

**PEMANFAATAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) UNTUK
MENINGKATKAN EKSPOR DALAM NEGERI (STUDI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA CUKAI JATIM I, SIDOARJO)**

**Gilang Gumilar
Imam Suyadi
Rosalita Rachma Agusti**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
115030400111075@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

Government effort to raise export activity in state depends on society role in joining to push in state export. Government policy become deciding factor of in state market expansion, the nature of policy that is taken becoming a special attention to industrialist in the country in order to decide which policy that they will take in import and export activity. This research aims to know the process in usage of ease to import for export destination in Kanwil DJBC Jatim I sidoarjo and the raise of finished goods in Jawa Timur. This research use a descriptive research with qualitative methods. The focuses on this research are the process of the facility, the raise number of industry who use this facility, control and usage of KITE facility, and the growth in export before and after KITE facility (PMK 176 & PMK 177). Research result shows that are some obstacle in use of KITE facility. Such as, some of the companies who has already use KITE facility has to been revoked form the facility because they are not able to qualify the terms in PMK 176 & PMK 177.

Keywords: *Export Raise, Government Policy, KITE Facility*

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kegiatan ekspor dalam negeri bergantung terhadap peran masyarakat dalam ikut andil untuk mendorong ekspor dalam negeri. Sifat kebijakan yang diambil menjadi perhatian khusus bagi para pengusaha dalam negeri menentukan kebijakan perusahaannya dibidang ekspor dan impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemanfaatan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) di Kanwil DJBC Jatim I Sidoarjo dan peningkatan ekspor barang jadi di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Fokus penelitian ini ialah proses pemanfaatan fasilitas KITE, peningkatan jumlah perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE, pengawasan dan pemanfaatan fasilitas KITE dan perbandingan ekspor sebelum dan sesudah fasilitas KITE (PMK 176 & PMK 177). Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan fasilitas KITE. Diantaranya, ialah beberapa perusahaan yang sudah memanfaatkan fasilitas KITE sebelumnya harus dicabut karena tidak dapat memenuhi persyaratan dalam PMK 176 & PMK 177.

Kata Kunci : *Peningkatan Ekspor, Kebijakan Pemerintah, Fasilitas KITE, PMK 176 & PMK 177*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional telah menjadi isu hangat di ranah politik domestik dan internasional akhir-akhir ini, munculnya organisasi perdagangan Internasional seperti *World Trade Organization* (WTO) mulai memicu kesadaran beberapa negara berkembang khususnya di kawasan Asia Tenggara dalam hal pentingnya perdagangan internasional. *Ascociation of South East Asia Nation* (ASEAN) telah mencanangkan organisasi serupa yaitu *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang disepakati pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. AFTA ialah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif maupun hambatan non tarif bagi negara-negara ASEAN (Antara, 2007).

Pengambilan kebijakan oleh pemerintah guna meningkatkan kegiatan ekspor diharapkan dapat melihat kondisi perekonomian dalam negeri dan mengambil kebijakan yang berpihak kepada pengusaha yang ada di Indonesia, fokusnya ialah dalam lingkungan perindustrian yang melaksanakan kegiatan ekspor barangnya ke luar negeri, di sisi lain dampak kebijakan ekspor dan impor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi menyebabkan penurunan pendapatan distribusi lokal dan menambah parah stabilitas ekonomi. Kegiatan ekspor dan impor menjadi perhatian khusus bagi negara-negara yang ikut andil dalam perdagangan internasional, oleh karena itu kegiatan ekspor dan impor wajib diberikan fasilitas oleh negara, khususnya kegiatan ekspor

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Fasilitas yang diberikan oleh negara dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pengusaha dalam negeri dalam produksinya sehingga mampu mendorong tingkat perekonomian negara, khususnya dibidang ekspor.

DJBC memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, peran DJBC dapat diwujudkan melalui banyak hal diantaranya ialah memberikan insentif fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi investasi dalam negeri (Al Bram; 2013;532) peran ini dimaksudkan agar melindungi masyarakat dari dampak ekonomi global, fasilitas untuk memudahkan industri dalam mengembangkan usahanya merupakan tugas yang berat dan tanggung jawab yang cukup besar. Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan Nomor : 176/PMK.04/2013 selanjutnya disingkat PMK 176 yang merupakan perubahan dari PMK 254/PMK.04/2011 tentang : Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor, sedangkan PMK 254/PMK.04/2011, selanjutnya disingkat dengan PMK 254. Peraturan ini sering disebut peraturan tentang fasilitas KITE Pembebasan dan 177/PMK.04/2013 selanjutnya disingkat PMK 177 yang merupakan perubahan dari PMK 253/PMK.04/2011 tentang : Pengembalian Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor, sedangkan PMK 253/PMK.04/2011, selanjutnya disingkat dengan PMK 253. Peraturan ini sering disebut peraturan tentang fasilitas KITE Pengembalian. berlaku sejak tanggal 6 Maret 2014.).

Peningkatan ekspor yang signifikan setelah fasilitas ini dibuat, diberlakukan atau diperbaharui, dengan adanya fasilitas ini diharapkan mampu memotivasi pengusaha dalam negeri untuk terus menambah devisa negara mengingat kegiatan ekspor merupakan salah satu penentu kesiapan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas mendatang. Oleh Karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim I, Sidoarjo)“.

TINJAUAN TEORI

Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional membutuhkan sumber pembiayaan yang sangat penting yaitu cadangan devisa. Kegiatan perdagangan internasional yang memberikan rangsangan guna membutuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik-pabrik besar, bersamaan dengan struktur politik yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel. Mc Griffin dalam Halim (2012:163) mendefinisikan perdagangan internasional yakni “Perdagangan di antara penduduk dua negara. Penduduk itu mungkin saja berupa individu, perusahaan, organisasi nirlaba, atau bentuk badan-badan yang lain.” Perdagangan internasional berkaitan dengan hubungan dagang antara dua negara, namun bukan hanya negara dengan negara, hubungan ini lebih luas sampai ke masyarakat dan organisasi yang terdiri di dalamnya.

Ekspor dan Impor

Kegiatan ekspor telah menjadi penentu produk buatan indonesia dapat bersaing di pasar luar negeri, Ekspor sendiri didefinisikan oleh Winardi (1977:139) “Benda-benda (termasuk jasa-jasa) yang dijual kepada penduduk negara lain, ditambah dengan jasa-jasa yang diselenggarakan kepada penduduk negara tersebut berupa pengangkutan dengan kapal, permodalan dan hal-hal lain yang membantu ekspor tersebut.” Pengaruh ekspor berdampak terhadap perekonomian negara, meskipun hanya salah satu faktor, ekspor masih dapat diandalkan dalam pemasukan negara.

Kegiatan impor dilakukan oleh negara bila adanya kebutuhan yang diperlukan suatu negara terhadap negara lain. Ratnasari dalam Benny (2013:1408) menjelaskan “Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat.” Sebagaimana dikemukakan oleh Winardi (1977:170) mendefinisikan impor “Benda-benda atau jasa-jasa yang dibeli dari luar negeri.” Pada hakikatnya impor dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan suatu negara, namun seiring berkembangnya kegiatan perekonomian impor yang dilakukan menjadi lebih berkembang.

Fasilitas KITE

Pemberian fasilitas pajak merupakan tindakan kebijaksanaan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, maka oleh sebab itu pajak dinilai sebagai suatu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan tersebut. Sejak reformasi pajak banyak fasilitas pajak yang dihapus berkaitan dengan pemerintah ingin meningkatkan penerimaan di bidang pajak Soemitro (1988:30) mengemukakan “Walaupun dalam era pajak baru tidak lagi terdapat fasilitas, tapi banyak juga kemudahan, yang tidak selalu berbentuk keringanan pajak yang telah diberikan kepada dunia usaha.”

Fasilitas KITE merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah di bidang PPN, fasilitas KITE diberikan dengan tujuan agar produsen/pengusaha dalam negeri mampu mengembangkan usahanya dan sanggup bersaing dengan perusahaan multinasional. Hal ini dilakukan pemerintah dengan cara mempermudah alur impor bahan baku masuk untuk produksi barang jadi yang kemudian di ekspor. Fasilitas KITE sebagaimana dimaksud dijelaskan oleh Winarno (2014:5) ialah “Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang berupa pemberian pembebasan dan atau pengembalian bea masuk dan atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut diberikan untuk memacu ekspor terutama ekspor non migas.” Fasilitas ini artinya diberikan agar ekspor barang non migas dapat meningkat di Indonesia. Selanjutnya Arba (2011) mengemukakan “Dengan fasilitas ini pada pengusaha yang melakukan pengolahan terhadap barang impornya dan ditujukan untuk diekspor maka dapat mengajukan pembebasan atau pengembalian.” Sutedi (2012:3) mengemukakan tentang fasilitas KITE yakni “Fasilitas yang diberikan kepada penggunaan jasa kepabeanan adalah tidak dipungut bea masuk, pembebasan bea masuk, pembebasan atau keringanan bea masuk dan pengembalian bea masuk”. Dari pernyataan di atas dapat dilihat fasilitas KITE merupakan fasilitas yang memberikan pembebasan dan pengembalian terhadap PPN yang dikenakan atas impor terhadap bahan baku tertentu yang akan digunakan untuk memproduksi barang jadi dan di ekspor.

Fasilitas KITE semula dikenal sebagai “*drawback system*”. Barang/ bahan baku impor yang telah dibayar bea masuknya setelah menjadi barang diekspor ke luar daerah pabean.

Atas realisasi ekspornya dimintakan restitusi (pengembalian bea masuk). Kepabeanan Indonesia sebagaimana dijelaskan Dimyati (2011:2) yakni : Prinsip kepabeanan Indonesia adalah semua barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dianggap sebagai barang impor dan terutang bea masuk, Barang impor merupakan objek pengenaan bea masuk, namun kewajiban pelunasan bea masuk terjadi jika barang impor tersebut “diimpor untuk dipakai. Dalam kasus KITE, barang tersebut tidak diimpor untuk dipakai melainkan diimpor untuk diekspor kembali. Barang impor yang dimasukkan ke Kawasan Berikat (KB) maupun barang impor untuk keperluan perusahaan KITE setelah dilakukan proses produksi, hasilnya diekspor. Oleh karena barang tersebut diekspor kembali, maka bea masuk dan pajak dalam rangka impornya tidak dipungut.

Perundang-undangan kepabeanan Indonesia memberikan dua pilihan fasilitas, pembebasan atau pengembalian bea masuk. Ketentuannya adalah atas barang/bahan baku asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, diberikan pembebasan bea masuk atau pengembalian bea masuk yang telah dibayar. Dengan demikian ada dua cara pemberian fasilitas, yaitu dengan pemberian pembebasan bea masuk, dan dengan pemberian restitusi/pengembalian bea masuk. Dalam Pribadi (2012:21) menjelaskan 2 jenis fasilitas KITE sebagai berikut :

1. Fasilitas pembebasan : pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke kawasan berikat.
2. Fasilitas pengembalian: pengembalian bea masuk dan/atau cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke kawasan berikat.

Fasilitas pembebasan maupun pengembalian bea masuk dapat diberikan kepada badan usaha yang telah memperoleh NIPER (Nomor Induk Perusahaan) pembebasan, atau NIPER pengembalian. NIPER sebagaimana dimaksud merupakan nomor identitas yang diberikan kepada perusahaan yang ingin menggunakan fasilitas KITE. Dimyati (2011:5) menjelaskan untuk memperoleh NIPER dimaksud badan usaha

mengajukan permohonan kepada kepala kantor wilayah atau kantor pelayanan utama bea dan cukai yang mengawasi lokasi pabrik badan usaha yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini ialah penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif dijelaskan Lincoln & Guba dalam Creswell (1994:4) *“The qualitative paradigm is termed the contructivist approach or naturalistic.”*. Fokus dalam penelitian ini ialah proses pemanfaatan fasilitas KITE, peningkatan jumlah perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE, pengawasan dan pemanfaatan fasilitas KITE dan perbandingan ekspor sebelum dan sesudah fasilitas KITE (PMK 176 & PMK 177). Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pegawai bea cukai yang menangani fasilitas KITE dan hasil observasi di lapangan oleh peneliti dan data sekunder yang berasal dari PMK, UU dan berita serta artikel di internet. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi non partisipan. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisa-analisa berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah. Peneliti berlandaskan pada pernyataan Creswell (2013:274) yang mengungkapkan bahwa *“Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.”* Analisa data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pemanfaatan fasilitas KITE merupakan proses yang panjang, adapun prosesnya sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu: pada perolehan NIPER dan melakukan impor bahan baku dan ekspor barang jadi. Pengaturan Fasilitas KITE merupakan salah satu kebijakan ekonomi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor. Beberapa kali penyempurnaan pengaturan fasilitas KITE dilakukan pemerintah, yang terakhir adalah pengaturan fasilitas KITE dalam PMK 176 dan 177/PMK.04/2013

Perbedaan PMK 176 & PMK 177 dengan PMK 253 & PMK 254

PMK 176 & PMK 177 sebagai penyempurnaan terhadap peraturan fasilitas KITE sebelumnya (PMK 253 & PMK 254) tentu perubahan dilakukan untuk terus mendorong ekspor dalam negeri sebagai tujuan utama KITE. Beberapa kali penyempurnaan pengaturan fasilitas KITE dilakukan pemerintah, yang terakhir adalah pengaturan fasilitas KITE dalam PMK 176 dan 177/PMK.04/2013. PMK terkini tersebut memberikan relaksasi di bidang finansial dan non finansial bagi perusahaan pemanfaat fasilitas KITE. Relaksasi di bidang fiskal berupa pembebasan Bea Masuk dan PPN/PPNBM tidak dipungut. Sedangkan relaksasi di bidang non fiskal berupa simplikasi persyaratan dan prosedur perizinan, fairness (fasilitas didasarkan pada Sistem Pengendalian Internal dan *IT Inventory*), harmonisasi kebijakan dengan Kawasan Berikat (KB)/Gudang Berikat (GB), otomasi (penggunaan dokumen softcopy), dan fasilitas nonfiskal lainnya berupa diaturnya penggunaan corporate guarantee, dan subkontrak. Relaksasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat industri dalam negeri terhadap pemanfaatan fasilitas KITE. Tentunya perubahan signifikan yang terjadi antara PMK yang lama dengan yang baru, perubahan ini akan dianalisis apakah mempengaruhi peningkatan ekspor bagi pengguna fasilitas KITE itu sendiri.

Dampak Pemberian Fasilitas KITE PMK 176 & PMK 177

PMK 176 & PMK 177 merupakan penyempurnaan terhadap PMK sebelumnya (PMK 253 & PMK 254), pada PMK terbaru yang ditanggihkan bukan hanya bea masuk tapi juga PPN dan PPnBM. Dampak keuangan yang timbul terhadap diberikannya fasilitas KITE PMK 176 & PMK 177 kepada perusahaan di Indonesia, Jawa Timur khususnya memberikan dampak yang cukup besar terkait tidak dipungutnya PDRI dan pajak terhadap industri yang ada di Jawa Timur. Pemanfaatan KITE pada umumnya dilihat berdasarkan peningkatan ekspor dalam negeri sebagaimana dimaksud pemerintah, namun disamping itu perusahaan pengguna KITE terlebih dahulu harus melakukan impor bahan baku dalam rangka ekspor barang jadi, dimana perusahaan memproses bahan baku tersebut untuk diolah menjadi barang jadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil DJBC Jatim I menunjukkan

ketidakstabilan volume impor pada fasilitas KITE selama tahun 2012 - 2014. Pada tahun 2012 sebanyak 167 perusahaan yang melakukan impor bahan baku, dengan volume impor sejumlah 738.014.195.659 dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2013 sebanyak 57 perusahaan yang melakukan impor bahan baku, dengan volume impor sejumlah 144.128.190.045, kemudian merangkak naik lagi pada tahun 2014 yang diikuti dengan menurunnya jumlah perusahaan yang melakukan impor sebanyak 39 perusahaan, dengan volume impor sejumlah 501.284.455.400. Ketidakstabilan impor yang ditunjukkan dapat mempengaruhi ekspor yang dihasilkan, artinya fasilitas KITE PMK 176 & PMK 177 belum menunjukkan maksud utamanya dalam meningkatkan ekspor, sehingga jarang ada yang melakukan kegiatan importasi untuk kebutuhan pemenuhan bahan baku produksi.

Kendala dalam Fasilitas KITE PMK 176 & PMK 177

Hasil penelitian yang dilakukan di Kanwil DJBC Jatim I, peneliti menganalisa penyebab dari belum efektifnya peraturan fasilitas KITE PMK 176 & PMK 177, peneliti menemukan beberapa penyebab peraturan KITE terbaru ini (PMK 176 & PMK 177) kurang berjalan efektif meskipun, pajak kini dimasukkan dalam penangguhan impor dan beberapa kelebihan pelayanan lain, diantaranya ialah :

1. *IT Inventory*

Penerapan *IT Inventory* sendiri baru berlaku pada PMK 176 & PMK 177 dari persyaratan yang diberikan untuk menerbitkan NIPER yang diutamakan ialah *IT Inventory*-nya. Hal ini peneliti anggap wajar sebab sebagai pelaksana fungsi pengawasan bea cukai mempunyai akses mudah dan terkomputerisasi untuk mengawasi perusahaan pengguna fasilitas dalam memanfaatkan fasilitas KITE, bea cukai mengontrol perusahaan melalui *IT Inventory*-nya. *IT Inventory* sendiri sebenarnya memberikan dampak positif bagi perusahaan, dimana perusahaan bukan hanya bea cukai dapat mengontrol arus barang yang keluar masuk, selain lebih praktis juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan oleh karyawan tersebut. Namun, dalam penerapan PMK 176 & 177 beberapa perusahaan belum bisa menerapkan *IT Inventory* disebabkan pengadaan *IT Inventory* yang mahal, dengan diterapkannya *IT Inventory* pada SKEP baru banyak perusahaan yang merasa keberatan, beliau menambahkan bahwa

pengadaan *IT Inventory* itu memakan biaya yang besar.

2. AFTA (ASEAN Free Trade Area)

Kemudahan yang dihadirkan dalam COO membuat fasilitas KITE kurang diminati oleh pelaku industri dalam negeri yang sering melakukan aktivitas impor dan ekspor di kawasan ASEAN, dimana AFTA ini menawarkan kemudahan yang lebih menguntungkan perusahaan. AFTA yang dicanangkan negara-negara di kawasan asia tenggara yang menyediakan fasilitas tidak ada hambatan tarif dan non tarif bagi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, dimana Indonesia merupakan anggota di dalamnya merupakan salah satu penyebab menurunnya pengguna fasilitas KITE, meskipun tidak berdampak langsung terhadap peningkatan ekspor negara tersebut namun cukup membuat fasilitas KITE kurang diminati oleh industri dalam negeri, terutama bagi industri yang mengimpor bahan baku dari kawasan ASEAN. Selain itu, administrasi yang dihadirkan dan persyaratan yang diberikan oleh fasilitas KITE masih rumit dan sulit dipenuhi oleh beberapa perusahaan industri dalam negeri.

Ekspor Terhadap Pengguna Fasilitas KITE

Data yang disajikan dalam penyajian data dimana peneliti memilih 7 perusahaan pengguna fasilitas KITE yang masih memiliki NIPER sebagai contoh untuk melihat kinerja ekspor masing-masing perusahaan sebagai pengguna KITE. Analisis terhadap 7 perusahaan yang merupakan pengguna fasilitas KITE yang masih memiliki NIPER di wilayah Kanwil DJBC Jatim I Sidoarjo, hasil yang didapat ialah sebanyak 4 perusahaan yang diantaranya ialah : PT Indospring Tbk, PT Kedawung Setia Industrial Tbk, PT Sekar Katokichi (Sekar Bumi) dan Yanaprima Hastapersada menunjukkan peningkatan penjualan bersih ekspor yang signifikan dimana analisis ini dilakukan dalam rentang waktu 3 tahun (2012 – 2014) sebelum berlakunya PMK 176 & PMK 177 dan sesudah berlakunya PMK 176 & PMK 177. Kemudian, terdapat 3 perusahaan sisanya yang kurang stabil dalam penjualan bersih ekspornya yaitu, PT Almi Indonesia Ekspor, PT Suparma Tbk dan PT Trias Sentosa Tbk namun ketiga perusahaan ini menunjukkan peningkatan penjualan ekspor pada tahun 2014, tahun setelah diberlakukannya fasilitas KITE PMK 176 & PMK 177 , hal ini dapat disebabkan oleh fasilitas KITE dan antusiasme perusahaan pengguna fasilitas

karena, fasilitas yang didapatkan bukan hanya ditanggungkannya bea masuk namun juga penangguhan pajak impor. Selain daripada hal itu kemudahan yang ditawarkan dalam fasilitas KITE pun kini mulai beragam, dengan diakuinya perusahaan yang berstatus baik dapat menjaminkan *corporate guarantee* dalam jaminan impornya dalam rangka memanfaatkan fasilitas lain, selain itu sinergi dari fasilitas KITE sendiri dengan fasilitas kepabeanan ataupun fasilitas perpajakan lainnya, kemudahan dalam pengawasannya dan modernisasi fasilitas dalam penggunaannya sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan, baik dari pihak penerima (industri) maupun dari pihak pemberi fasilitas (pemerintah), hal ini diharapkan dapat merangsang ekspor dalam negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembaharuan peraturan KITE mengenai *IT Inventory* sendiri terdapat beberapa kendala yang dialami oleh perusahaan pengguna fasilitas KITE diantaranya, ialah : mahalnnya pengadaan sistem aplikasi *IT Inventory* serta sumber daya manusia yang belum mampu menggunakan sistem aplikasi tersebut, hal ini menyebabkan berkurangnya pengguna fasilitas KITE. Selain pengadaan *IT Inventory* hal lain yang menyebabkan berkurangnya pengguna fasilitas KITE ialah *Certificate of Original* (COO) dan berlakunya AFTA di kawasan ASEAN, sehingga bagi perusahaan yang mengimpor bahan baku dari kawasan Asean lebih memilih menggunakan fasilitas tersebut, selain karena mudah juga tidak diperlukan pertanggungjawaban kepada pemberi fasilitas dalam hal ini pemerintah.

Peningkatan ekspor sebelum dan sesudah adanya fasilitas KITE telah terlihat hasilnya dalam 7 perusahaan pengguna fasilitas KITE sebagai contoh, yang diteliti annual reportnya untuk melihat jumlah penjualan ekspor perusahaan tersebut dalam kurun waktu 3 tahun yakni sejak tahun 2012, dimana fasilitas KITE masih berlaku PMK 253 & PMK 254 lalu 2013 sebagai waktu diterbitkannya fasilitas KITE dan tahun 2014 dimana tahun telah berlakunya fasilitas KITE PMK 176 & PMK 177, yang apabila suatu perusahaan memanfaatkan PMK terbaru maka, produksinya dapat dilihat pada tahun 2014 yang memanfaatkan KITE pada saat importasi pada tahun sebelumnya 2013. Dan sebanyak 7 perusahaan yang diteliti menunjukan peningkatan penjualan ekspor

pada tahun 2014. Hal ini menunjukan positifnya fasilitas KITE dan berpengaruh terhadap peningkatan ekspor, semenjak PMK sebelumnya kemudahan yang kemudian ditawarkan pada PMK terbaru memberikan kontribusi ekspor yang besar untuk industri dalam negeri.

Saran

Peneliti melihat peraturan fasilitas KITE PMK 176 & PMK 177 lebih berdampak kepada industri besar, namun, baik industri kecil, sedang dan menengah agaknya perlu diberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor yang selama ini dinikmati oleh hanya segelintir perusahaan yang memenuhi persyaratan NIPER. *Quo Vadis* bagi Fasilitas KITE adalah bagaimana Fasilitas ini juga dapat mengembangkan Industri dalam negeri khususnya industri kecil, sedang dan menengah. Agaknya pengadaan *IT Inventory* perlu dikaji ulang atau diberikan kemudahan untuk pengadaannya hanya terkait dengan penggunaan fasilitas KITE saja sehingga industri dalam negeri juga dapat menikmati fasilitas ini. Selain itu, kemudahan fasilitas yang diberikan haruslah tepat sasaran karena pembebasan pajak terhadap suatu alur produksi sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama ketika perusahaan tersebut diberikan pembebasan pungutan dalam rangka impor. Pengawasan yang diberikan juga baiknya diperketat sebab, fasilitas ini dibuat dengan karakteristik khusus dimana diwajibkan impor juga diwajibkan ekspor, pengawasan yang ketat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas yang diberikan dan fasilitas KITE benar-benar digunakan untuk meningkatkan ekspor dalam negeri sehingga dapat memajukan perekonomian bangsa dan merangsang berkembangnya industri dalam negeri, terutama yang ingin melebarkan pasarnya ke luar negeri. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji ulang penggunaan sistem *IT Inventory* terhadap pemanfaatan fasilitas ini, serta melihat kemungkinan pemanfaatan fasilitas KITE bagi industri mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Al Bram, H. Djafar. 2013. *Fasilitas Kepabeanan (Pajak Tidak Langsung, Bea Masuk) Guna Menunjang Industri dan Investasi*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 32 No.6.

Antara. 2007. *"Infrastruktur dan SDM Indonesia Belum Siap Hadapi AFTA"*. <http://www.antara.co.id/arc/2007/4/4/infra>

[struktur-dan-sdm-indonesia-belum-siap-hadapi-afta/](#) Diakses pada 24 Desember 2014

Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor.

Arba, Yan Muhtadi. 2011. *"Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)"*. <http://unconditionalblog.blogspot.com/2011/08/fasilitas-kemudahanimpor-tujuan-ekspor.html>. Diakses pada 13 Maret 2015

Pribadi, Januar Dona. 2012. *Analisa Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi dari PT. XYZ)*. Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia Jakarta.

Benny, Jimmy. 2013. *Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia*. Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4 Desember 2013

Soemitro, Rochmat. (1988). *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresco

Cresswell, J.W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publication Inc.

Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika

Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winardi. (1977). *Kamus Ekonomi*. Bandung: Penerbit Alumni

Winarno, Jatmiko. 2014. *Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan*. Jurnal Independen Volume 2

Dimiyati, Ahmad. 2011. *Fasilitas KB dan KITE: Alternatif Pemanfaatan Fasilitas Impor Bagi Industri Berorientasi Ekspor*. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai. Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta.

Halim, Abdul. (2012). *Teori Ekonomika*. Tangerang: Jelajah Nusa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas